RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

JL.PROF.RI.GONDOWARDOYO,SH NO.12 NGANJUK - 64418
TELP. (0358) 321376,323102 Faks.(0358) 321376 Email: disperindag@ nganjukkab.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 4

1.3. Maksud dan Tujuan..... 10

1.4.Sistematika Penulisan..... 11

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD..... 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 39

2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 54

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 58

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 130

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 131

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD..... 131

3.3. Program dan Kegiatan..... 134

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah..... 166

4.2. Sasaran Perangkat Daerah..... 167

4.3. Program/ Kegiatan./Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2023..... 168

BAB V PENUTUP 190

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatNya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Kerja Bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam waktu 1 (satu) tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang makmur melalui pengembangan sektor industri dan perdagangan

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan disampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja sektor industri dan perdagangan. Semoga dapat digunakan sebagai acuan dan perbaikan bagi kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja dimasa yang akan datang.

Nganjuk, Juni 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

HARIS JATMIKO,S.Pd,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19711219 199803 1 006

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024
RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Dinas

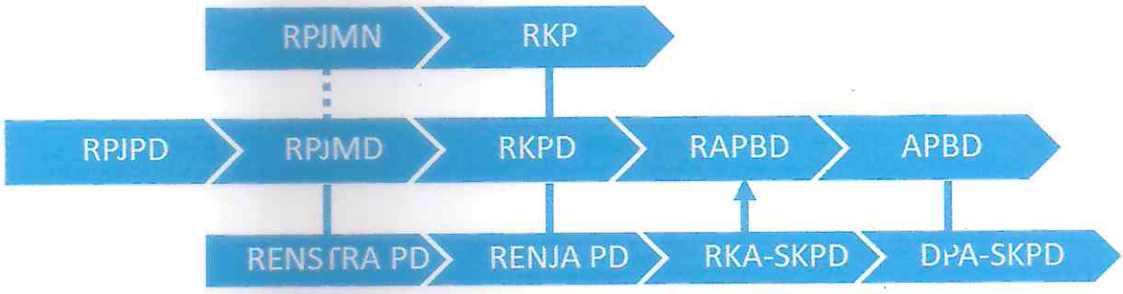
Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan , adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:

diperhatikan

dipedomani dan/atau diacu

dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77Tahun 2020

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pada akhirnya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor48,

17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
29. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
47. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
48. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
49. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
50. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
51. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 pada tahun ke-4 (ke-lima) periode tahun 2024; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuandan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2. 1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2022

KABUPATEN NGANJUK

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target danRealisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	31				**Urusan Pilihan Perindustrian**									
3	30	3	31		**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**									

3	31	1			**Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Survei Kepuasan Masyarakat	**80%**		**80%**	**80,47%**				

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	OUTPUT	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2021)	Target danRealisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1**	**2.1**			**Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun	**14 Dokumen**	**10 Dokumen**	**14 Dokumen**	**13 Dokumen**	**97%**	17 dokumen	12 dokumen	43 %
0 1	0 1	2. 01	0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 dokumen	0	4 dokumen	6 Dokumen	150	9 dokumen	6 dokumen	40%

0 1	0 1	2. 01	0 6		Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja yang disusun	4 Dokumen	10 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50%
0 1	0 1	2. 01	0 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	4 laporan	4 Dokumen	100%
0 1	**0 1**	**2. 0 2**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Keuangan yang disusun	**18 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**100%**			
0 1	0 1	2. 02	0 1		Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah ASN menerima Gaji dan Tunjangan	85 ASN		90 ASN	75 ASN	83	90 Orang	75 ASN	100%
0 1	0 1	2. 02	0 3		Pelaksanaan penatausahaan danpengujian /verifikasikeuangan SKPD	Jumlah Kelengkapan dokumen yang diverifikasi	50 Dokumen	0	50 Dokumen	84 Dokumen	168	50 Dokumen	50 Dokumen	100%

0 1	0 1	2. 02	0 5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100%
0 1	0 1	2. 02	0 7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disususn	2 Laporan	2 Laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	2 laporan	100%
0 1	**0 1**	**2. 0 3**			**Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang terdokumen	**1060**		**1060**	**1060**	**100%**			
0 1	0 1	2. 03	6		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Buku inventaris /kartu inventaris ruangan dan usulan status Penggunaan barang milik daerah pada SKP yang	7 Buku inventaris dan 4 usulan	0	0	0	0	4 usulan 7 buku inventaris	4 usulan 7 buku inventaris	100%

						disusun								
01	**01**	**2.05**			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terdokumen	**80**	**80**	**80**	**80**	**100%**			
01	01	02	06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Umum	11 Fasilitasi	11 Fasilitasi	11 Fasilitasi	6 Fasilitasi	54,55			
01	01	02.06	01		Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 Jenis	15 Jenis	11 Paket	11 Paket	100	11 Paket	10 Paket	93%

01	01	02.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Fasilitasi Penyediaan atk, Fasilitasi Penyediaan Makanan dan Minuman harian serta fasilitasi bahan Pembersih	12 Bulan	12 Bulan	4 Paket	4 Paket	100	12 Paket	6 Paket	30%
01	01	02.06	05		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Fasilitasi Penggandaan dan Jilid	12 bulan	12 bulan	2 Paket	2 paket	100	12 Paket	6 Paket	40%
01	01	02.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	6 bahan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
01	01	02.0	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	4 Laporan	2 Laporan	74%

		6				Kunjungan Tamu								
01	01	02.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	30 Laporan	30 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	26%
03	**07**	**2.07**			**Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah	7 Fasilitasi Pengadaan							
03	07	2.07	06		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 unit AC, 1 set CCTV, 1 TV, 3 Laptop, 5 Komputer, 5 Printer, 2 LCD Proyektor,1 Penghancur Kertas, 10 Finger Print	0	4 Jenis Pengadaan	4 Unit	100	14 Unit	4 Unit	29%
03	07	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Penyediaan jasa Penunjang	4 Jasa Penunjang	4 Jasa Penunjang	4 Jasa Penunjang	3 Jasa Penunjang	**75%**			

03	07	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Fasilitasi Benda Pos	12 bulan	465 surat	1000 Laporan	1000 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
03	07	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Fasilitasi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 PDAM, 16 Jasa Komunikasi, 26 Jasa Listrik	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
03	07	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Fasilitasi Jasa Pelayanan umum Kantor dan fasilitasi tenaga Administrasi	2 gedung dan 12 bulan	2 gedung	2 Laporan	1 Laporan	50%	12 Laporan	6 Laporan	34%
03	01	2.09			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Jenis barang milik daerah yang dipelihara	2 Jenis Barang Milik Daerah	2 Jenis Barang Milik Daerah	2 Jenis Barang Milik Daerah	2 Jenis Barang Milik Daerah	100%			
0	0	2.	0		Penyediaan Jasa	Jumlah	1 Unit Roda	1 Unit Roda	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	38%

3	7	09	1		pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang dipelihara	Empat	Empat						
0 3	0 7	2. 09	0 2		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang dipelihara	3 Unit Roda Tiga, 5 Unit Roda Empat, 8 Unit Roda Dua	16 unit	16 unit	16 unit	100%	18 Unit	18 unit	42%
0 3	0 7	2. 09	0 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	27 Unit	7 Unit	7 unit	100%	4 Unit	4 Unit	40%
0 3	0 7	16	4 6	4 6	Program Perencanaan dan Pembangunan	Persentas e	1,5%	1,5%	1,86%	1,97%	105,91%			

					Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan menengah								
3	07	02	2.01		Penyusunan,Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Jumlah Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
3	07	02	2.01	04	Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sarana industri Jmlah pelaku industri yang mendapat	20 Orang 10 IKM 10 sentra	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Sentra	2 Sentra	100%

						kan sarana industri Jumlah sentra yang dibentuk								
3	07	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang dilatih Jumlah Pelaku Industri yang dilatih	200 Orang, 75 Orang	60 IKM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	07	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah laporan yang disusun Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan	1 Laporan 2 Kali	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 laporan, 2 kali	1 laporan, 2 kali	100%

03	31	03			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pemantauan dan	84,20%	84,20%	72,2%	72,2%	100%			
						pengawasan izin usaha industri di SIINAs								
03	31	03	2.01		Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Penerbitan IUI,IPUI,IUKI dan IPKI berbasis SIINAS	45 Izin	45 Izin	28 Dokumen	28 Dokumen	100%	28 Dokumen	14 dokumen	50%
03	31	03	2.01	01	Fasilitisasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem	Jumlah Industri yang difasilitasi memenuhi ketentuan	5 Rekom 20 Izin 12 Kali	5 Rekom 20 Izin 12 Kali	2 kali	1 kali	50%	28 Dokumen	14 Dokumen	50 %

					Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintregasi Dengan Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintregasi Secara Elektronik	Jumlah izin yang terintegrasi Jumlah Pembinaan yang dilakukan								
						Jumlah Fasilitasi Bagi IKM Jumlah Monev yang dilakukan								
03	31	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pengelolaan data yang digunakan untuk pengawasan	20%	20%	20%	20%	100			
03	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN	Jumlah Informasi industri yang disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

					IPKI kewenangan Kabupaten/Kota									
03	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah updating yang terfasilitasi	0	0	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
03	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Penyusunan Profil Industri Kecil dan Menengah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
						Jumlah buku profil yang disusun Jumlah informasi produk industri yang	100 Buku 5 Kali	100 Buku 5 Kali						

						disediakan								
3	3 0				Urusan Pilihan Bidang Perdagangan									
3 0	0 2				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pengajuan rekomendasi teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100%	100%	90%	0	0	0	0	0
3 0	0 2	2. 0 6			Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monev Pengendalia n Fasilitasi Penyimpana n Bahan Berbahaya dan	12	12	4 Dokumen	0	0			

						Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								
30	02	2.06	03		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Sosialisasi dan Pembinaan Tertib Niaga	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	120 orang	120 orang	100%	120 orang	120 orang	100%
30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Omzet Perdagangan	989,12 Milyar	989,12 Milyar	989,12 Milyar	989,12 Milyar	100%			
30	03	2.01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Jumlah Pembangunan dan	33 Pasar	33 Pasar	7 Pasar	5280146668	89%	6 Unit		

					Perdagangan	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
30	03	2.01	01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Revitalisasi Pasar	5 Pasar	5 Pasar	9 Pasar	17 Pasar	188,89	6 Unit	0 pasar	0%
									200 orang					
						Pemeliharaan Fasum pasar	6 Pasar	6 Pasar						
						THL	200 THL	200 THL	200THl	193 THL	96,5%	179 THL	179 Thl	100%
						Biaya Pendukung Pasar	3 Pasar	3 Pasar						
30	03	2.02			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat diwilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	33 Pasar dan 11 Pasar Pendukung	33 Pasar dan 11 Pasar Pendukung	33 Pasar dan 11 Pasar Pendukung	33 Pasar dan 11 Pasar Pendukung	100%			

3 0	0 3	2. 02	0 1		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedian ya Karcis Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Kebersiha n Pasar	33 Pasar dan 11 Pasar Pendukung	33 Pasar dan 11 Pasar Pendukung	33 Pasar	33 Pasar	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	-
3 0	0 4				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentas e Pengawas a n Harga Pokok	5,71%	5,71%	5,71	50,2	50,2	100%		
3 0	0 4	2. 01			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersedia a n barang pokok dan barang penting	11	11	1 Laporan					
3 0	0 4	2. 01	0 2		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisa si Peningkat	12 Kali	12 Kali	0	0	0	0	0	0

					tingkat agen dan Pasar Rakyat	an aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting								
30	04	2.02			Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi harga yang dilaksanakan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50 %
30	04	2.02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	360 Hari	360 Hari	264 hari	360	86%	4 Laporan	2 Laporan	50%
30	04	2.03			Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah	Jumlah Pengawsan yang dilaksanak	24 Kali	24 kali	0	0	0			

					Kabupaten/Kota	a n								
3 0	0 4	2. 03	0 3		Pengawasan Penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Pengawas an Penyalura n dan Pengguna an yang dilaksanak an	24 Kali	24 Kali	4 Kali	1 Kali	25%	12 Laporan	0	0
3 0	0 6				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentas e Alat Ukur takar Timbang dan Perlengka p annya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku	90,00%	90,00%	86%	45,49%	50,54%			
3 0	6	2. 01			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,tera ulang dan	Jumlah Pelaksana a n	25.250 UTTP	25.250 UTTP	18.000 unit	9.597 Unit	82%	'18000 Unit	956	-

					Pengawasan	Metrologi legal Beryupa tera/tera Ulang dan Pengawas a n								
30	6	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera ulang	Jumlah alat yang dipelihara Jumlah Pasar yang mengikuti Lomba Pasar tertib Ukur jumlah UTTP yang terdata Jumlah UTTP yang wajib ditera/tera ulang	541 Unit 27000 UTTP 24000 UTTP	541 Unit 27000 UTTP 24000 UTTP	18.000 UTTP	9.597 UTTP	53,32%	5000 Unit	956 UTTP	19,12 %

30	6	2.01	02		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	jumlah Informasi Kemetrologian yang disampaikan Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi SosialisasiTera/Tera ulang UTTP dan BDKT jumlah UTTP,BDKT dan Satuan Ukuran yang difasilitasi Pengawasan	18 Kali 720 Masyarakat 400 Masyarakat	18 Kali 720 Masyarakat 400 Masyarakat	4 kali 120 Pelaku Usaha 200 Pelaku Usaha	4 kali 120 masyarakat 250 Pengawas	100 100 125	100 Masyarakat	4 Kali 437 Masayarakat 0 Pengawas	4,00%
30	07				**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**Persentase Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk**	**75%**	**75%**	**75%**	**64%**	**85,33%**			

3 0	0 7	2. 01			**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk**	**450 Pelaku Usaha, 9 Event Pameran,4 THL**	**450 Pelaku Usaha, 9 Event Pameran, 4 THL**	**100 Pelaku Usaha**	**85 Pelaku Usaha**	**85%**			
3 0	0 7	2. 01	0 2		**Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri ditingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi Promosi**	**150 Pelaku Usaha dan 2 Event Pameran , 4 THL**	**150 Pelaku Usaha**	**128 Pelaku Usaha**	**89%**	**85%**	47 UMKM	61 UMKM	129,78%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kategorisasi Capaian Kinerja

Nilai	Kategori	Warna	Notifikasi
≥ 80%	Tercapai	Hijau	
60% - 79%	Kurang Tercapai	Kuning	
≤ 59%	Tidak Tercapai	Merah	

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel 2.4berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Notifikasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,59%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	

Program Perencanaan dan pembangunan industri	101,52%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	101,70%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
ProgramPengelolaan Sistem Industri Nasional	101,80	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	53,32%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Menurunnya Jumlah UTTP karena Pedagang Beralih menggunakan timbangan konvesional ke timbangan Digital dari 6 alat UUTP menjadi 1 alat UTTP	Tidak tercapainya target renstra	Updating data jumlah UTTP
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagagan	259,76%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	104,45%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Adanya Pembatasan	Telah Tercapai	

kegiatan sehingga promosi hanya dilaksanakan secara online		
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

2.2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi				Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan												
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten	0,49%	1,87%	1,97%	2,01%	0,49%	1,97%	0,95%	2,01%	1,15	1,35	1,55	
2	Persentase Terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	82,0%	90%	90%	90%	82,01%	95,83%	96.35%	90%	93,97	93,97	93,97	

NO	Indikator IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi				Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
5.	Persentase alat-alat ukur, takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku	88,30%	85,00	85,55	86,11	63,52%	47,39%	53,31%	86,11	85,00	85,55	86,11	
6.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan diwilayah Kerjanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	

TABEL 2.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2019-2021

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN TAHUN			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN			
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PERINDUSTRIAN											
1	Persentase IKM yang terstandarisasi	18,5	18,9	19,6	20,3	21,06	18,13	19,14	19,67	98	101,27	100,36
2	Persentase Peningkatan Usaha Industri	1,67	1,77	1,87	1,97	2	1,62	1,7	1,97	97,01	96,05	105,35
3	Persentase Peningkatan IKM berbasis Produk Lokal	6,16	6,28	6,38	6,48	6,58	6,2	5,51	6,55	100,65	87,74	101,08
II	PERDAGANGAN											
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	5,76	5,78	5,8	5,82	5,84	5,7	5,69	5,82	98,96	98,44	100,34
2	Nilai Ekspor	45	47	49	51	53	48	38	50,1	106,67	80,85	102,24

~~3.3.2~~ 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Rendahnya daya saing industri dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk
b. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya sumber daya industri daerah
c. Belum terbentunya sentra industri
d. Terbatasnya jaringan informasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri
e. Belum tertibnya izin usaha industri yang dimiliki oleh pelaku usaha Industri
f. Belum optimalnya Pemberdayaan eksportir, importer dan perizinan terhadap perdagangan dan peningkatan produk
g. Belum tertibnya Penataan toko modern
h. Rendahnya Kepatuhan Pemilik ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan tera/tera ulang
i. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pasar rakyat
j. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang .

2.3.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Bidang Perindustrian

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumahtangga) di berbagai wilayah Kabupaten Nganjuk, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga mengalami tren yang terus naik. Dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas

perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil yang memiliki legalitas usaha. Demikian pula dengan industri kecil semakin berkembang menjadi industri menengah dan besar dengan dimilikinya legalitas usaha berupa Ijin Usaha Industri (IUI). Akan tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian NOMOR 41/MIND/PER/6/2008.

Melalui beberapa program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Kepa Daerah terpilih. Perkembangan usaha di sektor industri seperti tercantum dala table 2.6

Tabel 2.6

Perkembangan Usaha Industri Pada tahun 2017 – 2022

Jenis Data								Satuan
a. Industri Non Formal								
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Unit Usaha	15.836	16.085	15.998	16.052	16.216	16,214	Unit
2.	Tenaga Kerja	47.796,42	48.545	44.192	44.236	44.687	54,386	Orang
3.	Nilai Produksi	2.112.518.876.160	2.146.577.825.982	1.904.350.567.798	1.904.388.067.798	1.923.812.826.090	1,904,569,567,798	Rupiah
4	Nilai Investasi	21.015.504.110	21.353.347.738	19.361.203.084	19.383.204.087	19.580.912.769	19,396,710,087	Rupiah
b. Industri Formal								
1	Unit Usaha	1.252	1.272	1.294	1.316	1.329	1,369	Unit
2	Tenaga Kerja	19.007,03	19.307	17.658	17.702	17.883	17,812	Orang
3	Nilai Produksi	3.359.484.352.000	3.413.932.732.384	3.000.849.858.450	3.000.868.958.450	3.031.477.821.826	3,000,983,558,450	Rupiah
4	Nilai Investasi	78.761.182.940	80.036.116.238	71.423.258.069	71.423.258.068	72.151.775.300	75,757,966	Rupiah

1. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan. Berikut rekapitulasi data di bidang perdagangan

tahun 2017-2020 seperti pada table 2.7 berikut

Tabel 2.7

Nilai Ekspor

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Ekspor	53.600.565.329	43.980.029.708	38.640.852.988	50.100.000.000	16,651.815.394,76

2. Bidang Metrologi

Dengan terbitnya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Nomor : 56/PKTN/KKPTTU/08/2018 dan berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Metrologi Legal (UML) oleh Tim Penilai, maka Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mampu melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sesuai lingkup :

1) Meter Kayu, Timbangan Otomatis, Timbangan Bukan Otomatis, Anak Timbangan dan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak ;
2) Ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang UTTP meliputi :

Tabel 2.8

RUANG LINGKUP DAN DAFTAR STANDRAT YANG DIMILIKI

NO	RINCIAN UTTP	PERALATAN DAN STANDART UKURAN YANG DIMILIKI /DIGUNAKAN
1	Meter Kayu	Komparator sidang 1m / 1m
2	Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII (TermasukTimbangan Jembatan Maksimum Kapasitas 5	- Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 500 g)

	Kapasitas 5 Ton)	500 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 g – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 Kg – 20 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100mg – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M2 (2 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (5 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (10 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (20 Kg) - Anak Timbangan Lemping sampai dengan 110 kg - Anak Timbangan Bidur M2 20kg (25 buah)
3	Timbangan Pegas	
4	Timbangan Cepat	
5	Timbangan Cepat Meja	
6	Neraca	
7	Dacin	
8	Timbangan Milisimal	
9	Timbangan Sentisimal	
10	Timbangan Desimal	
11	Timbangan Bobot Ingsut	
12	Timbangan Meja Beranger	
13	Anak Timbangan sebagai Perlengkapan Timbangan Neraca, dan Meja	- Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 500 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 g – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 Kg – 20 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100mg – 1000 g) - Timbangan Elektronika 2000 g/0.01 g - Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1000 g) - Timbangan Elektronika 2000 g/0.001g
14	Pompa Ukur BBM	- Bejana ukur 5L, 10L, 20L - Gelas ukur 1000ml/10ml - penyipat datar - Landasan bejana ukur - Stopwatch - thermometer

Adapun Jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan tahun 2016-2020 adalah seperti pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
JumlahUTTP

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah UTTP	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	18.000

1. Bidang Pasar

Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, peningkatan manajemen pengolahan pasar dan disiplin pedagang di dalam lingkungan pasar sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan secara berkesinambungan. Retribusi pelayanan pasar terdiri dari Biaya baliknama dan perpanjangan SK Hak ijin Pakai atas Toko, Bedag tepi/luar,bedag dalam Los, dibawah los, pelataran, Penitipan Kendaraan serta Ternak dalam Pasar. Adapun data tentang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2016-2020 adalah seperti pada tabel 2.10 berikut terlampir

Tabel 2.10

Retribusi Pelayanan Pasar

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bedag tepi /luar	Rp	1.618.328.368,98	1.442.091.968,82	1.473.576.036,82	1.165.231.475,67	1.598.342.153,80	1.583.084.763,46
2	Bedag dalam	Rp	598.129.100,00	588.881.050,00	757.905.200,00	538.914.661,00	736.691.800,00	1.094.309.400
3	Bedag dalam los	Rp	730.289.050,00	651.276.300,00	678.263.200,00	491.850.900,00	615.613.400,00	726.525.000
4	Di bawah Los	Rp	557.999.700,00	581.026.200,00	663.931.800,00	495.770.220,00	689.486.000,00	971.666.900
5	Pelataran	Rp	187.986.950,00	160.857.100,00	162.293.500,00	127.723.150,00	178.237.200,00	191.854.100
6	Ijin tempat	Rp	268.059.185,81	238.329.625,00	239.424.496,16	245.169.334,48	256.731.475,76	250.701.439,33
7	Penitipan kendaraan	Rp	149.416.500,00	147.689.170,00	152.944.500,00	116.375.000,00	172.444.000,00	164.032.500
8	Ternak	Rp	51.359.500,00	56.581.000,00	60.811.000,00	47.832.500,00	64.899.000,00	151.842.500
9	BBN (Bea Balik Nama)	Rp	84.001.815,00	73.772.252,00	43.770.692,50	16.739.306,00	46.376.060,00	27.773.421

2.3.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya jumlah pelaku usaha industri yang berdaya saing	Pelaku usaha industri masih bersifat konvensional	Manajemen usaha dan peralatan yang digunakan bersifat tradisional
		Standarisasi produk yang belum sesuai dengan SNI	Rendahnya kesadaran pelaku usaha industri terhadap legalitas produk
		Kurang optimalnya informasi produk unggulan potensi daerah	Kurangnya/rendahnya pengetahuan pelaku usaha industri tentang pemasaran
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran antar daerah	Rendahnya pengetahuan dan sarana prasarana pelaku usaha industri terhadap teknologi
2	Belum tertibnya pelaku usaha industri dalam melakukan usahanya	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian (Monev) yang dilakukan	Minimnya kompetensi SDM pelaksana sektpr industri
			Terbatasnya jumlah personil pelaksana sektor industri

		Rendahnya ketaatan pelaku usaha industri sesuai dengan perundangan yang berlaku	Belum optimalnya pengetahuan tentang ketaatan dan kewajiban pelaku usaha industri
3	Jumlah Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapanny a (UTTP) yang dilayani belum maksimal	1. Masih rendahnya kepatuhan pemilik UTTP dalam melakukan tera/tera ulang sebagai wujud dari perlindungan konsumen . 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanan tera /tera belum memadai.	1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tera/tera ulang. Tidak memadainya sarana berupa mobil layanan tera/tera ulang. 2.
		3. Pengawasan pada UTTP yang sudah di tera/tera ulang dan BDKT yang sesuai dengan aturan masih belum optimal	3. Tidak adanya tenaga pengawas yang sudah bersertifikat
4	Penataan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	1. Sarana dan Prasarana distribusi Perdagangan belum memadai 2. Belum optimalnya Pengelolaan Pembayaran Retribusi 3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang	Tidak memadainya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan Pengelolaan Pembayaran Retribusi Belum dilaksanakan Secara Elektronik Pengelolaan masih

			dilaksanakan secara tradisional
5	Harga ditentukan Pedagang/pasar	Belum dapat menstabilisasi harga barang pokok dan barang Penting	Belum Optimalnya Pelaksanaan Operasi Pasar
7	Belum siapnya Produk yang siap diekspor	Kreteria Produk belum memenuhi syarat	Belum Profesionalnya Pelaku Usaha
8	Belum Optimalnya Penataan toko modern	Sudah adanya Pelaku Usaha yang sudah beroperasional sesuai dengan peraturan	Tidak berkembangnya pasar rakyat karena Belum Optimalnya Penertiban berdirinya toko modern

Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah **"NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**, pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud, (Perangkat Daerah) memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke-.1

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

2.3.3.1. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

1. Terkait dengan Lingkungan

Perkembangan teknologi akibat revolusi industri 4.0, perubahan regulasi dan kebijakan akibat perang dagang serta meningkatnya globalisasi, Diharapakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mampu mempelajari fenomena perubahan lingkungan dan menyerap informasi yang berkembang dan mampu memprediksi outcome/impact dari suatu kebijakan

2. Terkait Data Dan Informasi

Data dan informasi sangat penting dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan memiliki data dan informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir

3. Terkait Kapasitas Kebijakan

Dalam pengelolaan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi harus dilakukan menyeluruh terhadap outcome/impact dan melibatkan analisis mendalam terhadap data dan kualitas dan capaian kinerja. Sehingga kebijakan dan program mendasarkan pencapaian outcome/impact.

b. Peluang

a. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang memberikan keleluasaan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi 49elati
b. Adanya keterbukaan kerjasama dengan pihak lain baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kota/ Kabupaten lain, swasta, lembaga donor, LSM dan lembaga- lembaga lain untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program
c. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang mendukung pengembangan Industri, Perdagangan dan Pasar
d. Jumlah penduduk, pelaku usaha, sumber daya alam untu dikembangkan,
e. Ketahanan Pelaku Usaha Kecil dan menengah terhadap krisis ekonomi 49elative cukup kuat karena kemandirian pelaku usaha
f. Kemudahan dalam menyampaikan informasi melalui berbagai media

2.3.3.2. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

No	Isu- isu strategis	Tindak lanjut program	Ket
1.	Rendahnya daya saingindustri dikarenakanketerbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri 2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	

		PemberdayaanIndustri danPeran Serta masyarakat	
2	Belum terbentunya sentra industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan	
		Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	
3	Belum tertibnya izin usaha industri yang dimiliki oleh pelaku usaha Industri	Program Pengendalian izin usaha industry Kegiatan Penerbitan izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri ((IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI< IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI,	

		IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	
4.	Terbatasnya jaringan informasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri	Program Pengembangan Ekspor Kegiatan Penyelenggaran Promosi dagang melalui Pameran Dagang dan misi dagang bagi produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 Daerah Kabupaten/Kota Sub	
		Kegiatan 1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 2. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	
5.	Rendahnya Kepatuhan Pemilik ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan tera/tera ulang	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera ulang dan Pengawasan Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang 2. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	
6.	Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pasar rakyat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
7.	Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang .	Program PeningkatanSarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganan Sub Kegiatan : 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan awal RKPD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. NGANJUK TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**19,099,611,209.00**							**22,210,712,786.00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**19,099,611,209.00**							**22,210,712,786.00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**7,218,608,900.00**							**8,434,160,000.00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan***	**90 %**			**90 %**	**89,900,000.00**						**90 %**	**268,890,000.00**	

			dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan													
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diproses*	2 Dokumen			2 Dokumen	0.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	pelaku usaha	2 Dokumen	5,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen			2 Dokumen	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	pelaku usaha	2 Dokumen	5,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Persentase Penerbitan Tanda Daftar gudang*	90 %			90 %	89,900,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Pelaku Usaha	90 %	98,890,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

											Berkeadilan	Kabupaten Nganjuk					
	3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang															
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	27 Dokumen			26 Dokumen	89,900,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	Pelaku Usaha	27 Dokumen	98,890,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	*jumlah rekomendasi teknis surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri*	20 Dokumen			20 Dokumen	0.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan invest	Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri	20 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												asi serta produ ktivitas dan daya saing sektor unggul an Kabup aten Nganj uk					
	3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik															
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokum en	0.00	- Kab. Nganju k, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	-	Memp erkua t Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuha n Yang Berkua litas dan Berkea dilan	PP1 - Pemuli han Ekono mi Keraky atan melalu i Pen ingkat an Nilai Tamba h Sektor Sekun der dan Pariwi sata; Menin gkatk an invest asi serta produ ktivitas dan daya saing sektor	Peneri ma Warala ba dari Warala ba dalam negeri		0,000,000.00	DINAS PERINDU STRIAN DAN PERDAGA NGAN

												unggulan Kabupaten Nganjuk					
	3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri															
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	10 Dokumen			10 Dokumen	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas	Penerima Waralaba dari Waralaba dalam negeri	10 Dokumen	0,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk				
	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	*jumlah rekomendasi teknis surat tanda pendaftaran dan /atau lanjutan waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba luar negeri*	2 Dokumen			2 Dokumen	0.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabup	Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba luar negeri	2 Dokumen	10,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												aten Nganjuk					
	3.30.02.2.04.01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri															
			Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen			1 Dokumen	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas	Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba luar negeri	1 Dokumen	5,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk				
	3.30.02.2.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				1 Dokumen	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor	Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba luar negeri		,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												unggulan Kabupaten Nganjuk					
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Jumlah Rekomendasi teknis izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer dan penjual langsung minum di tempat*	1 Dokumen			1 Dokumen	0.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabup	Pelaku Usaha	1 Dokumen	,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												aten Nganjuk					
	3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C															
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas	Pelaku Usaha	1 Dokumen	5,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk					
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah monev pengendalian fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah Kabupaten/Kota*	4 laporan			4 laporan	0.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya	Kab. Nganjuk	4 laporan	50,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk					
	3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya															
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	2 Laporan			2 Laporan	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Keraky atan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas	Kab. Nganjuk	2 Laporan	2,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk				
	3.30.02.2.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	2 Dokumen			2 Dokumen	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor	Kab. Nganjuk	2 Dokumen	2,500,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												unggulan Kabupaten Nganjuk				
	3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan			10 Laporan	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	Kab. Nganjuk	11 Laporan	25,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Omzet perdagangan***	**1.158 milyar**			**1,026 milyar**	**6,161,497,450.00**						**1.089 milyar**	**6,450,000,000.00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan*	13 unit			7 unit	5,572,142,050.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	pedagang pasar rakyat	10 unit	6,000,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit			4 Unit	5,572,142,050.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	pedagang pasar rakyat	8 Unit	6,000,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdaganga n Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan*	35 pasar			35 pasar	589,355,400.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	pedagang pasar rakyat	35 pasar	450,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen			1 Dokumen	589,355,400.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	pedagang pasar rakyat	1 Dokumen	450,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Prosentase Kinerja Realisasi Pupuk***	**97 %**			**95.84 %**	**261,211,600.00**						**96 %**	**525,270,000.00**	

	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah kabupten/kota*	4 laporan			4 laporan	0.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	Kab. Nganjuk	4 laporan	180,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan			4 Laporan	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	Kab. Nganjuk	4 Laporan	60,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan			4 Laporan	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Keraky atan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	Kab. Nganjuk	4 Laporan	60,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan			4 Laporan	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	Kab. Nganjuk	4 Laporan	60,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	*jumlah laporan informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota*	4 laporan			4 laporan	162,216,600.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	pelaku usaha	4 laporan	245,270,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan			4 Laporan	66,841,600.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	pelaku usaha	4 Laporan	67,635,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan			4 Laporan	23,755,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	pelaku usaha	4 Laporan	67,635,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan			2 Laporan	71,620,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	pelaku usaha	2 Laporan	110,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*jumlah laporan Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten /kota*	4 laporan			4 laporan	98,995,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Kab. Nganjuk	4 laporan	100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan			4 Laporan	98,995,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Kab. Nganjuk	4 Laporan	100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor***	**50 %**			**60 %**	**124,945,850.00**						**50 %**	**200,000,000.00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi*	12 pelaku usaha			12 Pelaku Usaha Ekspor	124,945,850.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	pelaku usaha	12 pelaku usaha	200,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha			2 Pelaku Usaha	75,000,000.00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	pelaku usaha	2 Pelaku Usaha	100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor														
			Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	2 Pelaku Usaha			2 Pelaku Usaha	49,945,850.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	pelaku usaha	2 Pelaku Usaha	100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku***	**86.11 %**			**85 persen**	**231,054,000.00**						**85.55 %**	**190,000,000.00**	

	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Pelaksanaan Metrologi legal Beryupa tera/tera Ulang dan Pengawasan*	8611 UTTP			8500 UTTP	231,054,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Pemilik UTTP	8555 UTTP	190,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8611 Unit			8500 Unit	81,054,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Pemilik UTTP	8555 Unit	125,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														

			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	180 Orang			120 Orang	150,000,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Keraky atan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Pemilik UTTP	150 Orang	65,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk***	**61.04 %**			**51.94 %**	**350,000,000.00**						58.44 %	800,000,000.00	

	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri*	47 UMKM			40 UMKM	350,000,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Masyarakat Kab. Nganjuk	45 UMKM	800,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

			Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	47 UMKM			40 UMKM	350,000,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Masyarakat Kab. Nganjuk	45 UMKM	800,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**11,881,002,309.00**							**13,776,552,786.00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan***				**85,20 Nilai**	**11,346,002,309.00**							**1,556.00**	

	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				17 Dokumen 31 Dokumen	110,996,200.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		105,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	40,263,400.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		0,00 0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	32,866,400.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Keraky atan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		)00.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	37,866,400.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		)00.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*umlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				104 Dokumen	9,589,133,059.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		9,707,552,786.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ bulan	9,480,597,059.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		552,6.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	49,200,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		51,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1,000,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		1,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	58,336,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		5,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah*				1 Dokumen	10,200,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		0,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10,200,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		0,00 0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 dokumen	156,250,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		250,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	56,250,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP1 - Pemulihan Ekonomi Keraky atan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		0,00 0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				85 Orang	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganj	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		00,0 0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												uk				
	3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	100,000,000.00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP1 - Pemulihan Ekonomi Keraky atan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		00,00.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah*				4 Dokumen	423,098,600.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		581,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	3,350,900.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9,400,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkua	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor	aparatur sipil negara		5,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

											litas dan Berkeadilan	unggulan Kabupaten Nganjuk				
	3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	101,475,200.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		00,00.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	17,066,500.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6,000,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		0,00	0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	34,454,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkua	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor	aparatur sipil negara		0,00	0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

											litas dan Berkeadilan	unggulan Kabupaten Nganjuk					
	3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	251,352,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		200,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.31.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		5,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				7 unit	492,292,800.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	aparatur sipil negara		1,865,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan	-	aparatur sipil negara		00,00.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

											Berkeadilan					
	3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	195,582,750.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		00,00.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel														

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				101 Unit	34,800,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		150,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	261,910,050.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkua	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor	aparatur sipil negara		280,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

										UMUM -DANA ALOKASI UMUM	litas dan Berkeadilan	unggulan Kabupaten Nganjuk				
	3.31.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Keseh atan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabup	aparatur sipil negara		00,00.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												aten Nganjuk					
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				4 laporan	357,436,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya	aparatur sipil negara		353,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk					
	3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,000,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas	aparatur sipil negara		3,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk					
	3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	262,800,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		225,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		0,00 0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	92,636,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	aparatur sipil negara		0,00 0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*				7 unit	206,595,650.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	aparatur sipil negara		190,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	79,998,450.00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	aparatur sipil negara		50,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	51,997,200.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	aparatur sipil negara		0,00	0.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel														

			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	10,000,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	aparatur sipil negara		0,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	14,600,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	aparatur sipil negara		25,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	aparatur sipil negara		50,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang disusun***	**62.5 %**			**50 %**	**377,300,000.00**						57 %	545,000,000.00	

	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	*Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	8 Dokumen			5 Dokumen	377,300,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	Industri Kecil dan Menengah	7 Dokumen	545,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	180,000,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk	Industri Kecil dan Menengah	0 Dokumen	140,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen			1 Dokumen	70,000,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkua	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor	Industri Kecil dan Menengah	2 Dokumen	105,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

											litas dan Berkea dilan	unggul an					
	3.31.02. 2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Doku men			1 Dokum en	127,300,0 00.00	- Kab. Nganju k, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMUM -DANA ALOK ASI UMUM	Memp erkua t Ketah anan Ekono mi Untuk Pertu mbuha n Yang Berkua litas dan Berkea dilan	PP1 - Pemuli han Ekono mi Keraky atan melalu i Pen ingkat an Nilai Tamba h Sektor Sekun der dan Pariwi sata; Menin gkatk an invest asi serta produ ktivitas dan daya saing sektor unggul an	Industri Kecil dan Menen gah	2 Doku men	300,000,0 00.00	DINAS PERINDU STRIAN DAN PERDAGA NGAN
3.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGEND ALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha***	**80 %**			**77 %**	**45,800,00 0.00**						**79 %**	**70,000,00 0.00**	

			industri di SIINas													
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Penerbitanizin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota*	36 Dokumen			31 Dokumen	45,800,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Industri Kecil dan Menengah	33 Dokumen	70,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui	35 Dokumen			30 Dokumen	45,800,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan	Industri Kecil dan Menengah	32 Dokumen	70,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

			SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS													
4.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Persentase pengelolaan data dalam SIINas***	**25 %**			**25 %**	**111,900,000.00**						**25 %**	**100,000,000.00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Dokumen			5 Dokumen	111,900,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor	Industri Kecil dan Menengah	4 Dokumen	100,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												unggulan				
	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen			1 Dokumen	71,900,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya	Industri Kecil dan Menengah	2 Dokumen	60,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												saing sektor unggulan					
	3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas															
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen			2 Dokumen	40,000,000.00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya	Industri Kecil dan Menengah	2 Dokumen	40,000,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

												saing sektor unggul an					
	JUMLAH							19,099,61 1,209.00							22,210,71 2,786.00		

1.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan Forum Gabungan Perangkat Daerah usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor,antara lain urgen tidaknya, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil				

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah " **Meningkatnya Produktifitas sektor Industri dan perdagangan"**

adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan Perdagangan", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	Target 2024
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatkannya produktivitas sektor industri dan perdagangan			Pertumbuhan PDRB(ADHB) sektor industri	%	11.8
				Pertumbuhan PDRB(ADHB) sektor Perdagangan	%	5,4
		Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	2,1
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	2	Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan	%	6,1

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten

Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2024, yaitu **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan prioritas pembangunan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat
3. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata kelola sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman
5. Meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Meningkatkan stabilisasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

3.3.2. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 terdiri dari program-program yang menunjang visi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Program ini mencakup urusan Perindustrian dan Perdagangan serta program-program penunjang

6.1 BIDANG PERINDUSTRIAN

6.1.1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan menengah Melalui Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri, fasilitasi saranadan Prasarana bagi Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat

6.1.2 Program Pengendalian Izin usaha Industri

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis SIINAS

6.1.3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Pengelolaan sistem informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI melalui Pengumpulan, Pengolahan, analisis Data Industri, Diseminasi dan Publikasi data informasi serta Pemantaun dan Evaluasi kepatuhan Industri

6.2 BIDANG PERDAGANGAN

6.2.1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase Pengajuan Rekomendasi teknis izin Penerbitan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, Penerbitan Surat Tanda

Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan Minuman beralkohol Golongan B dan C serta Pengendalian fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan Pengawasan

6.2.2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Jumlah Sarana dan prasarana Pasar yang difasilitasi serta Pembinaan terhadap Pengelola Pasar.

6.2.3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalahPersentase Pengawasan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaan ,Pengendalian Harga dan Stok barang kebutuhan Pokok dan barang Penting lainnya serta Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi.

6.2.4 Program Pengembangan Ekspor

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase Peningkatan fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor melalui Penyelenggaraan promosi dagang, pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor.

6.2.5 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Alat - alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku serta Pengawasan.

6.2.6 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri. Melalui Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

3.3.1. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan dengan target TPB/*SDG's*.

Tabel 3.2

Realisasi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk
Sampai Tahun 2021

Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua										
8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS, Nganju kDalam Angka	%	5,39	-	-	-	-	5,85	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas

										Pariwisata Kepemudaan Olaharaga dan Kebudayaan
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS, Nganju kDalam Angka	Rp	22.414.415,89	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro,

										Dinas Pariwisata Kepemudaan Olaharaga dan Kebudayaan

8.2.1.2**	Nilai ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Laporan Kinerja Tahunan	Rp (milyar)	43	45	47	49	51	53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1.(c)**	Persentase peningkatan IKM berbasis produk lokal	Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Laporan Kinerja Tahunan	%	6,16	6,28	6,38	6,48	6,58	6,68	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi										
9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi										

industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1.(a).1**	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	BPS, Nganjuk Dalam Angka	%	12,74	13,25	13,75	14,25	14,75	15,25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.2.1.(a).2**	Pertumbuhan industri	BPS, Nganjuk Dalam Angka	%	3	3,5	4	4,5	5	5,5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1.1**	Persentase IKM terstandardisasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan: Laporan	%	15,97	18,50	18,90	19,60	20,30	21,06	Dinas Perindustrian dan

		Kinerja Tahunan								Perdagangan

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana table 3.3 berikut:

TABEL 3.3 REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Urusan/Bidang Urusan PemerintahDaerah dan Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5
Urusan Pilihan Perindustrian				
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Survei Kepuasan Masyarakat	**80%**	**11.778.232.059**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**17 Dokumen**	**75.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	30.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	4 Dokumen	25.000.000

		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	20.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**104 Dokumen**	**9.476.597.059**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 ASN	9.376.149.059
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen penata usahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD	60 Dokumen	50.040.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.608.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	25 Laporan	44.800.000

		SKPD		
Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	**1 Laporan**	**10.000.000**
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Nganjuk	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**85 Orang**	**100.000.000**
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Nganjuk	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	85 Orang	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	**476.135.000**
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk	jumlah paket komponen intalasi listrik/penenrangan bangunan kantor yang disediakan	50 Paket Komponen	6.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nganjuk	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	100.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kab. Nganjuk	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nganjuk	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	175.000.000

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk	jumlah paket barang cetakan dan pengadaanyang disediakan	12 Paket	3.335.000
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.800.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk,dalam Provinsi jawa Timur Luar Provinsi Jawa Timur	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	170.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000
Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 unit	**867.000.000**

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk	jumlah unit krndaraan dinas operasionalatau lapangan yang disediakan	2 unit roda dua, 2unit roda empat	310.000.000
Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk	jumlah paket mebel yang disediakan		75.000.000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Nganjuk	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit AC, 1 set CCTV, 1 TV, 3 Laptop, 5 Komputer ,	182.000.000
			5 Printer, 2 LCD Proyektor ,1 Penghancur Kertas,10 finger Print, 2 Ipad	
Penggadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Nganjuk	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 gedung arsip	300.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 laporan	**187.500.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kab. Nganjuk	jumlah laporan penyediaan jasa	1 laporan	200.000.000

Sumber Daya Air dan Listrik		komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nganjuk	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	50.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	45.000.000
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah		Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	7 Unit	**77.000.000**
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nganjuk	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	50.000.000
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Nganjuk	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit Roda Tiga, 5 Unit Roda Empat, 8 Unit Roda Dua	50.000.000
Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	30 Meja dan Kursi	7.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan	Kab. Nganjuk	Jumlah peralatan dan	15	20.000.0

Mesin lainnya		mesin lainnya yang dipelihara	Unit	00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Gedung	50.000.000
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		**Persentase jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan industri yang disusun**	**50,0%**	**505.000.000**
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	**5 Dokumen**	**505.000.000**
koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	120.000.000
Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 dokumen	95.000.000
Koordinas, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta	1 Dokumen	200.000.000

		masyarakat		
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 Dokumen	90.000.000
Program Pengendalian Izin Usaha Industri		**Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri di SIINas**	**77,00%**	**120.000.000**
Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**31 Dokumen**	**120.000.000**
Fasilitisasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintregasi Dengan Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintregasi Secara	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil fasilitas verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi	30 Dokumen	65.000.000

Elektronik		dan tinggi, melalui SIINas yang terintergrasi dengan sistem OSS		
Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINNAS)	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri,perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	55.000.000
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		**Persentase Pengelolaan data dalam SIINas**	**25%**	**225.000.000**
Penyediaan Informasi Industri untukinformasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah DokumenPenyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	**5 Dokumen**	**225.000.000**
Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis dataindustri, data kawasan industri	2 dokumen	60.000.000

Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SINas)		
Diseminasi, Publikasi data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINas	1 Dokumen	125.000.000
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas	2 Dokumen	40.000.000
Urusan Pilihan Bidang Perdagangan				
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	**35 Dokumen**	**94.900.000**
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko	**2 Dokumen**	**5.000.000**

		Swalayan yang diproses		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Nganjuk	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan melalaui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2 Dokumen	5.000.000
Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Prosentase penerbitan TDG		**89.900.000**
Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	33 Dokumen	89.900.000
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)untuk penerima Waralaba dari waralaba Dalam Negeri		**Jumlah Rekomendasi teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)untuk penerima Waralaba dari waralaba Dalam Negeri**	**20**	**100000000**
fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	10	50.000.000,00

Elektronik				
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen yang Diverifikasi sebagai pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri	10	50.000.000,00
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)untuk penerima Waralaba lanjutan dari waralaba luar Negeri		**Jumlah Rekomendasi teknis Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri**	**2**	**10000000**
Sistem pelayanan perizinan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) TerintegrasiSecara Elektronik luar negeri	Kab. Nganjuk	Jumlah data dan Informasi sistem PelayananPerizinan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri	1	5.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan SuratTanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen yang diverifiasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	1	5.000.000

		Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		
Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di		**Jumlah rekomendasi Teknis izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat**	**1 Dokumen**	**5.000.000**
tempat				
Fasilitasi Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Nganjuk	Jumlahsurat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	5.000. 000
Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah monev Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan**	**4 Laporan**	**50.000.000**

		dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Penyimpanan bahan berbahaya	2 Laporan	12.500.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	2 Laporan	12.500.000
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelebelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	10 Laporan	25.000.000
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		**Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**12%**	**6.400.000.000**
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**4 unit**	**5.950.000.000**
Penyediaan Sarana	Kab.	Jumlah Sarana	4 unit	5.950.000.

Distribusi	Nganjuk	Distribusi Perdagangan		000
Perdagangan				
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat diwilayah Kerjanya		**Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**35 Pasar**	**450.000.000**
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	450.000.000
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			**95.84**	**440.936.600**
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Ketersediaan barang pokok dan barang penting**	**4 Laporan**	**180.000.000**
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaann Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	4 Laporan	60.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok	4 Laporan	60.000.000

tingkat agen dan Pasar Rakyat		dan Barang Penting di tingkat agen dan pasar rakyat		
Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi tingkat agen dan Pasar Rakyat	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	60.000.000
Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Informasi Harga dan stokbarang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**4 laporan**	**61.486.600**
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pemantauan harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang	4 laporan	61.486.600
pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Pentingpada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok barangKebutuhan pada sistem	4 laporan	61.486.600
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar	2 laporan	100.000.000

(satu) Kabupaten/Kota		Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**199.450.000**
Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	4 Laporan	99.725.000
Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	4 Laporan	99.725.000
Pengawasan Penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	4 Laporan	99.725.000
Program Pengembangan Ekspor		Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	**50%**	**550.000.000**
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	**Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi**	**4 Pelaku Usaha**	**550.000.000**

Pembinaan dan pengembangan usaha produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha produk Ekspor Unggulan yang dibina	2	50.000.000
Pameran Dagang Nasional	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang	2	100.000.000
Pameran Dagang Lokal	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang Lokal	2	100.000.000
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	100.000.000
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pelatihan	2	100.000.000
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	2	100.000.000
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		**Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku**	**85,00%**	**150.000.000**
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,tera ulang dan Pengawasan		**Jumlah Pelaksanaan Metrologi legal Beryupa tera/tera Ulang dan Pengawasan**	**6950 Unit**	**250.000.000**
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera	Kab. Nganjuk	Jumlah alat Ukur, alat takar, alat timbangdan	6950 UTTP	200.000.000

ulang		alat perlengkapan ditera /tera ulang		
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi legal yang dibina	120 Orang	50.000.000
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		**Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk**	**51,94%**	**1.098.000.000**
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		**Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**40 UMKM**	**1.198.000.000**
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	700.000.000
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	298.000.000
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Data dan Informasi sistem dan jaringan informasi Perdagangan	1 Dokumen	100.000.000
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan	Kab. Nganjuk	jumlah Orang yang mengikuti Pemberdayaan	100 orang	100.000.000

Penggunaan dan Pemanfaatan sandang Produksi dalam negeri		masyarakat dalam peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan sandang Produksi dalam negeri		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2024)
1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat khususnya ibu rumah tangga dan pemuda melalui antara lain teknologi informasi dan ekonomi kreatif	Rp 2.385.286.600
2	Optimalisasi dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Rp. 5.950.000.000
3	Bangga bela dan Beli Produk Lokal	Rp. 1.198.000.000
4.	Menciptakan Pasar yang bersih dan Sehat	Rp. 450.000.000

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2024**	Alokasi (2024)
1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	2,10	Rp. 850.000.000
4. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	20,59	Rp. 9.133.286.600

Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5
Urusan Pilihan Perindustrian				
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Survei Kepuasan Masyarakat	**80%**	**11.778.232.059**
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**17 Dokumen**	**75.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	30.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	4 Dokumen	25.000.000

SKPD		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	20.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104 Dokumen	9.476.597.059
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 ASN	9.376.149.059
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen penata usahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD	60 Dokumen	50.040.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nganjuk	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.608.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Nganjuk	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	25 Laporan	44.800.000
Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	1 Laporan	10.000.000
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Nganjuk	jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	10.000.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**85 Orang**	**100.000.000**
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Nganjuk	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	85 Orang	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	**476.135.000**
Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nganjuk	jumlah paket komponen intalasi listrik/penenrangan bangunan kantor yang disediakan	50 Paket Komponen	6.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nganjuk	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	100.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Kab. Nganjuk	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nganjuk	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	175.000.000

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Kab. Nganjuk	jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	12 Paket	3.335.000
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.800.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Nganjuk	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk,dalam Provinsi jawa Timur Luar Provinsi Jawa Timur	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	170.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	5.000.000
Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 unit	**867.000.000**

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nganjuk	jumlah unit krndaraan dinas operasionalatau lapangan yang disediakan	2 unit roda dua, 2 unit roda empat	310.000.000
Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk	jumlah paket mebel yang disediakan	4 kursi peja bat, 100 kurs i rapa t	75.000.000
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Nganjuk	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit AC, 1 set CCTV, 1 TV, 3 Laptop, 5 Kompute r,	182.000.000
			5 Printer, 2 LCD Proyekto r,1 Penghan cur Kert as,1 0 finge r Prin t, 2 Ipad	
Penggadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Nganjuk	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 gedung arsip	300.000.000
Penyediaan Jasa		Jumlah Laporan	4	**187.500.000**

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	laporan	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	200.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nganjuk	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	50.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	45.000.000
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah		Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	7 Unit	**77.000.000**
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nganjuk	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	50.000.000

Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kab. Nganjuk	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit Roda Tiga, 5 Unit Roda Empat, 8 Unit Roda Dua	50.000.000
Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	30 Meja dan Kursi	7.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit	20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nganjuk	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Gedung	50.000.000
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		**Persentase jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan industri yang disusun**	**50,0%**	**505.000.000**
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	**5 Dokumen**	**505.000.000**
koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1 Dokumen	120.000.000
Koordinasi, dan Sinkronisasi	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	2 doku	95.000.000

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana industri		sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	men	
Koordinas, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industridan peran serta masyarakat	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen	200.000.000
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1 Dokumen	90.000.000
Program Pengendalian Izin Usaha Industri		**Persentase pemantauan dan pengawasanizin usaha industri di SIINas**	**77,00%**	**120.000.000**
Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**31 Dokumen**	**120.000.000**

Fasilitisasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintregasi Dengan Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintregasi Secara Elektronik	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil fasilitas verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintergrasi dengan sistem OSS	30 Dokumen	65.000.000
Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINNAS)	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri,perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	55.000.000
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		**Persentase Pengelolaan data dalam SIINas**	**25%**	**225.000.000**

Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah DokumenPenyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	**5 Dokumen**	**225.000.000**
Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis dataindustri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SINas)	2 dokumen	60.000.000
Diseminasi, Publikasi data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupaten/kota melalui SIINas	1 Dokumen	125.000.000
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian	Kab. Nganjuk	jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian	2 Dokumen	40.000.000

Data ke SIINas		data ke SIINas		
Urusan Pilihan Bidang Perdagangan				
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	**35 Dokumen**	**94.900.000**
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diproses	**2 Dokumen**	**5.000.000**
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Nganjuk	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan melalaui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2 Dokumen	5.000.000
Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Prosentase penerbitan TDG		**89.900.000**
Fasilitasi Penerbitan	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Tanda Daftar	33 Dokume	89.900.000

tanda daftar Gudang		Gudang	n	
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)untuk penerima Waralaba dari waralaba Dalam Negeri		**Jumlah Rekomendasi teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)untuk penerima Waralaba dari waralaba Dalam Negeri**	**20**	**100000000**
fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	10	50.000.000,00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen yang Diverifikasi sebagai pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri	10	50.000.000,00
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)untuk penerima Waralaba lanjutan dari waralaba luar Negeri		**Jumlah Rekomendasi teknis Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik luar**	**2**	**10000000**

		negeri		
Sistem pelayanan perizinan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri	Kab. Nganjuk	Jumlah data dan Informasi sistem Pelayanan Perizinan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri	1	5.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen yang diverifiasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1	5.000.000
Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di		**Jumlah rekomendasi Teknis izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat**	**1 Dokumen**	**5.000.000**
tempat				
Fasilitasi Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan Minuman	Kab. Nganjuk	Jumlahsurat izin usaha perdagangan untukpengecer dan penjual	1 Dokumen	5.000.000

Beralkohol Golongan B dan C		langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik		0 0
Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah monev Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**50.000.000**
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil Pemeriksaan Penyimpanan bahan berbahaya	2 Laporan	12.500.000
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	2 Laporan	12.500.000
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan bahan berbahaya	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelebelan bahan	10 Laporan	25.000.000

terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		**Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**12%**	**6.400.000.000**
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**4 unit**	**5.950.000.000**
Penyediaan Sarana Distribusi	Kab. Nganjuk	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 unit	5.950.000.000
Perdagangan				
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat diwilayah Kerjanya		**Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan**	**35 Pasar**	**450.000.000**
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	450.000.000
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok			**95.84**	**440.936.600**

dan Barang Penting				
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Ketersediaan barang pokok danbarang penting**	**4 Laporan**	**180.000.000**
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Ketersediaann Kebutuhan Pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	4 Laporan	60.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi tingkat agen dan Pasar Rakyat	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksebilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pasar rakyat	4 Laporan	60.000.000
Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingdi tingkat agen dan Pasar Rakyat	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pengendalian ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	60.000.000
Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Informasi Harga dan stokbarang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**4 laporan**	**61.486.600**
Pemantauan Harga	Kab.	Jumlah Laporan	4	61.486.600

dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting	Nganjuk	Pemantauan harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang	lapor an	
pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota		Penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota		
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan pada sistem	4 laporan	61.486.600
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2 laporan	100.000.000
Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**199.450.000**
Pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan	Kab. Nganjuk	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	4 Laporan	99.725.000
Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida	4 Laporan	99.725.000

bersubsidi		bersubsidi		
Pengawasan Penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Kab. Nganjuk	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	4 Laporan	99.725.000
Program Pengembangan Ekspor		Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	**50%**	**550.000.000**
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	**Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi**	**4 Pelaku Usaha**	**550.000.000**

Pembinaan dan pengembangan usaha produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha produk Ekspor Unggulan yang dibina	2	50.000.000
Pameran Dagang Nasional	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang	2	100.000.000
Pameran Dagang Lokal	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang Lokal	2	100.000.000
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi misi	2.	100.000.000

		Dagang Produk Ekspor Unggulan		
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pelatihan	2	100.000.000
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	2	100.000.000
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		**Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku**	**85,00 %**	**150.000.000**
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,tera ulang dan Pengawasan		**Jumlah Pelaksanaan Metrologi legal Beryupa tera/tera Ulang dan Pengawasan**	**6950 Unit**	**250.000.000**
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera ulang	Kab. Nganjuk	Jumlah alat Ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera /tera ulang	6950 UTTP	200.000.000
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Nganjuk	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi legal yang dibina	120 Orang	50.000.000
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		**Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk**	**51,94 %**	**1.098.000.000**

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		**Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**40 UMKM**	**1.198.000.000**
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	700.000.000
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	298.000.000
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Nganjuk	Jumlah Data dan Informasi sistem dan jaringan informasi Perdagangan	1 Dokumen	100.000.000
Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan	Kab. Nganjuk	jumlah Orang yang mengikuti Pemberdayaan masyarakat dalam	100 orang	100.000.000

sandang Produksi dalam negeri		peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan sandang Produksi dalam negeri		

Tabel 4.4

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
	NIHIL					

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan

3. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.